

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu Negara meningkat secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi di Indonesia meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi itu sendiri, maka ukuran taraf pembangunan ekonomi yang dicapai suatu Negara tidak mudah diukur secara kuantitatif. Berbagai jenis data yang perlu dikemukakan untuk menunjukkan suatu prestasi pembangunan yang dicapai oleh suatu Negara.

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang intinya adalah adanya kewenangan dari pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai wujud dari otonomi daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, maka akan terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pengelolaan pemerintah yang selama ini bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Implikasi dari persamaan otonomi daerah adalah transformasi peran pemerintah pusat dan daerah. Pada pemerintah pusat semakin kecil, sebaliknya peran pemerintah daerah akan semakin besar dalam pembangunan wilayahnya. Dengan demikian pembangunan dapat di harapkan lebih berorientasi pada kebutuhan daerah setempat (Supramono, 1992).

Selama 16 tahun pertama masa orde baru, sektor pertanian telah menjadi basis utama strategi pembangunan dan berperan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Kemudian peningkatan produksi dan produktivitas bahan pangan yang secara kebetulan bersamaan dengan fenomena revolusi hijau telah mampu mengentaskan masyarakat dari kelaparan dan kemiskinan

dalam sejarah Indonesia modern. Kinerja besar yang sering dijadikan romantisasi pembangunan pertanian di Indonesia adalah pencapaian swasembada beras pada pertengahan 1980an orde baru memperoleh penghargaan dari organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) (Arifin, 2005).

Beberapa upaya yang dapat dilakukan guna peningkatan sumber pendapatan untuk membiayaan daerah dilakukan dengan cara, diantaranya adalah : dengan mengambil potensi sumber daya alam yang sangat berarti sebagai sumber penerimaan daerah dan juga mendorong investor agar daerah meningkatkan sektor swasta. Sehingga pendapatan masyarakat bertambah dengan adanya sektor swasta, jika pendapatan masyarakat bertambah berarti ada sebagian hasil pendapatan bisa ditabung, dan dari hasil tabungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Pemerintahan daerah mempunyai peluang yang sangat luas sekaligus sebagai kewajiban serta tantangan yang tidak ringan dalam sebuah perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber-sumber yang ada di daerahnya, selain itu juga perlu dilakukan reorganisasi dan reskotrukturisasi organisasi pemerintah yang menerapkan manajemen satu atap (Supramono, 1992). Dengan demikian tidak mengherankan jika kemampuan keuangan yang ditujukan melalui besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki masing-masing daerah, merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui dan mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Ketika suatu daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar dan selalu meningkat jumlah presentase pencapaian setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan dan kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun,

ketika daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan timbul masalah dan gejala ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut. Oleh karena itu, besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi daerah, semakin besar jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin besar pula kesempatan daerah tersebut untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerah menuju penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Pertanian di Indonesia belum menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional. Penyebabnya adalah pola pembangunan sektor pertanian yang selama ini lebih diarahkan kepada tujuannya, yaitu sebagai pemasok makanan sehingga kurang usaha-usaha diversifikasi produksi. Faktor penyebab lainnya adalah pola industrialisasi yang selama pemerintahan orde baru, lebih mengedepankan pembangunan industry-industri yang menghasilkan barang-barang jadi yang bahan baku utamanya bukan dari sektor pertanian (Tambunan, 2003).

Pelaksanaan otonomi daerah mendorong pemerintah Kabupaten/kota untuk melakukan penggalan potensi-potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implikasinya, identifikasi sektor / sub sector andalan akan mendorong perencanaan pembangunan ekonomi daerah agar lebih terfokus pada sektor tersebut. Penggalan sumber-sumber potensi ekonomi daerah sangat penting dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomian daerah tanpa banyak tergantung pada subsidi dari pusat. Secara teoritis peningkatan suatu perekonomian masyarakat akan menyebabkan naiknya taraf

hidup masyarakat tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk menjalankan peranannya dalam pembangunan. Dinas Pertanian melalui Sub Dinas Tanaman Pangan, Sub Dinas Peternakan, Sub Dinas Perikanan, Sub Dinas Perkebunan dan Sub Dinas Kehutanan diharapkan mampu mengelolah sektor pertanian sehingga nantinya sektor pertanian dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan dari Dinas Pertanian.

Kabupaten Halmahera Barat adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Barat juga dikenal sebagai salah satu kabupaten tertua di provinsi Maluku Utara dengan potensi sumber daya alam yang kaya karena lokasinya yang berada di pulau bergunung memiliki sumber daya alam yang melimpah. Belum lagi posisinya yang terletak di bibir Samudra Pasifik yang mana jika dikembangkan dengan baik hal ini dapat menjadi peluang untuk mengembangkan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat.

**Tabel : 1.1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Halmahera Barat (miliar rupiah), 2017–2021**

Komponen Lapangan Usaha	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	499 417,68	519 853,75	539 450,97	556 467,36	574 429,43
Pertambangan dan Penggalian	1 373,19	1 438,12	1 502,51	1 517,91	1 571,63
Industri Pengolahan	85 409,42	85 986,43	86 174,53	78 517,26	71 799,71
Pengadaan Listrik dan Gas	1 502,65	1 527,06	1 665,63	1 750,75	1 921,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2 762,85	2 900,65	3 038,78	3 209,72	3 345,21
Konstruksi	71 337,22	78 174,59	85 104,50	76 256,98	79 385,56
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	218 192,10	234 640,73	252 689,30	251 660,71	260 249,05
Transportasi dan Pergudangan	30 221,79	31 987,55	34 073,71	31 721,64	32 845,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3 252,52	3 422,96	3 729,71	3 306,33	3 569,93
Informasi dan Komunikasi	46 193,90	47 863,36	49 954,98	52 744,40	57 188,40
Jasa Keuangan dan Asuransi	38 078,11	39 199,17	40 066,67	40 882,86	42 896,41
Real Estate	1 057,79	1 105,27	1 162,30	1 170,60	1 213,97
Jasa Perusahaan	2 458,84	2 555,54	2 606,37	2 683,71	2 793,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	288 962,03	304 004,14	325 717,69	331 879,29	321 506,93
Jasa Pendidikan	45 356,70	47 512,38	49 597,83	49 657,85	50 096,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34 419,79	36 380,08	38 504,45	41 042,68	42 248,16
Jasa Lainnya	5 677,6	6 266,15	6 821,13	6 726,05	7 027,41
Produk Domestik Regional Bruto	1 375 674,20	1 444 817,92	1 521 861,06	1 531 196,10	1 554 087,73

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dalam periode waktu 2017 sampai dengan 2021, dapat dilihat bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berkontribusi sangat besar pada PDRB Kabupaten Halmahera Barat guna meningkatkan pendapatan daerah untuk menopang perekonomian Daerah.

Perekonomian Kabupaten Halmahera Barat didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha yaitu : Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan; Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib; Industry Pengolahan Dan Konstruksi. Dari 5 sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Barat, salah satunya adalah Sektor Pertanian. dan dapat dilihat dari potensii daerah, Kabupaten Halmahera Barat yang memiliki produksi pertanian terbesar.

Dalam hal ini akan dilihat sektor yang menjadi basis dari Kabupaten Halmahera Barat yaitu Sektor Pertanian yang akan menimbulkan peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), di karenakan Kabupaten Halmahera Barat merupakan salah satu kabupaten yang memiliki produksi pertanian terbesar.

Table 1.2. PAD Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2017-2021

No	Tahun	PAD
1	2017	22.406.700.000
2	2018	21.955.951.449
3	2019	34.781.858,000
4	2020	148.220.011.000
5	2021	563.920.162.000

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam periode waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi dalam pencapaian target. Terlihat pada tahun 2017 mengalami penurunan dan terus mengalami penurunan di tahun selanjutnya hingga pada tahun 2019 mengalami kenaikan dan terus berkembang hingga di tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup drastis.

Walaupun dalam pencapaian anggaran Pendapatan Asli Daerah telah tercapai namun belum mencerminkan keadaan perekonomian yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Kabupaten Halmahera Barat mengalami fluktuasi pencapaian anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun terakhir pada tahun 2017-2021. Jika dianalisa kurang stabilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sesuai dengan semangat perkembangan ekonomi saat ini yang seharusnya meningkat ke proses yang lebih baik dari pada tahun sebelumnya, walaupun peningkatan tidak secara signifikan namun seharusnya bisa meningkat secara terstruktur dari tahun ke tahun untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Dalam hal ini pergerakan sektor-sektor didalam PDRB tentu memiliki andil dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat yang berbanding lurus dengan upaya pencapaian dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Barat. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pendapatan terbesar adalah sektor pertanian.

Dari hasil laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Barat dalam kurung waktu 2017-2021 di dominasi oleh sektor pertanian.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pendapatan Asli Daerah”** untuk mengetahui seberapa besar peran sektor pertanian untuk perekonomian Kabupaten Halmahera Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang penelitian, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai arah terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar kontribusi sektor pertanian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Barat periode 2017-2021?
2. Bagaimana hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sektor pertanian Kabupaten Halmahera Barat periode 2017-2021?
3. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Barat periode 2017-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Barat periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sektor pertanian Kabupaten Halmahera Barat periode 2017-2021.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Barat periode 2017-2021.

1.4. Manfaat / Kegunaan Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah, sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan diambil. Sebagai bahan masukan bagi pihak terkait untuk meningkatkan Pendapatan Daerah terutama dari sektor pertanian
2. Bagi universitas, sebagai tambahan bahan bacaan dan pengetahuan serta masukan bagi pihak-pihak yang berminat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum dan kaitan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sektor pertanian secara khususnya.
3. Bagi penulis, sebagai sarana menerapkan teori yang pernah didapat dalam praktek yang sesungguhnya.